

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budhijanto, D. (2013). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Judhariksawan. (2005). *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2013). *Hukum Penyiaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, M. (Bandung). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manan, B. (2012). *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Fikahati Aneska bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

- Mappiasse, S. (2017). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerbatin, S. D. (1997). *Kisi-Kisi Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Prodjodikor, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (1898). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: FH UNDIP.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Riswandi. (2013). *Dasar-Dasar Penyiaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Sianutri, K. E. (2002). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Syamsuddin, M. (2012). *Kontradiksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas.

### **Artikel Majalah Ilmiah**

- Siregar Granky. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta". Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016.

Maya Septiani. "Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik". Ombudsman.go.id. 2020.

Henry Subiakto. "Sistem Media Yang Demokratis Untuk Indonesia Baru". Universitas Airlangga. 2001.

### **Internet**

Delegasi dari ICTA (26 Juni 2014). Diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/40-topik-pilihan-2/32156-pentingnya-legalitas-lembaga-penyiaran-berlangganan-lpb-kabel> [28 Oktober 2020, pukul 10:17]

Wikipedia (24 Mei 2019). Diakses dari [http://www.id.wikipedia.org/wiki/Televisi\\_terestrial](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Televisi_terestrial) [11 November 2020, pukul 10.35]

### **Koran Online**

Tempo (1 Februari 2015). Menteri Rudiantara Pangkas Waktu Perizinan. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/639095/menteri-rudiantara-pangkas-waktu-perizinan/full&view=ok> [28 Oktober 2020, pukul 10:21]

### **Peraturan Perundang–Undangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, Dan Terestrial
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009.